



# Analisis Dampak Pemekaran terhadap Lapangan Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan

Charles Panggabean\*, J.Ary Mollet, Transna Putra Urip

Universitas Cenderawasih

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja lapangan usaha dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya PDRB menurut lapangan usaha. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan menjadi sampel penelitian melalui teknik sampel jenuh, dengan total 28 observasi yang mencakup tujuh kabupaten dan empat tahun penelitian (2020–2023). Analisis dilakukan menggunakan uji beda *Paired Sample t-test* untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pemekaran pada variabel PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi, serta pertumbuhan lapangan usaha jasa pendidikan. Sebaliknya, variabel pertumbuhan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua periode. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemekaran daerah memberikan dampak positif pada sebagian besar sektor ekonomi, namun belum berpengaruh nyata pada sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

**Kata kunci:** PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Sektor Usaha, Pemekaran Daerah.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5139/>

\*Correspondence: Charles Panggabean

Email: [charlespanggabean@yahoo.co.id](mailto:charlespanggabean@yahoo.co.id)

Received: 28-10-2025

Accepted: 14-11-2025

Published: 21-11-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the impact of regional expansion on business sectors and economic growth in the Papua Pegunungan Province. The research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), specifically the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by business sectors. All districts in Papua Pegunungan Province were included as research samples through a saturated sampling technique, resulting in a total of 28 observations covering seven districts over four years (2020–2023). The analysis was conducted using the Paired Sample *t-test* to compare conditions before and after the regional expansion. The results indicate significant differences before and after the expansion in the variables of GRDP, GRDP per capita, growth in the agriculture, forestry, and fisheries sector, growth in the construction sector, and growth in the education services sector. Conversely, the health and social services sector did not show significant differences between the two periods. These findings suggest that regional expansion has had a positive impact on most economic sectors, although it has not produced a notable effect on the health and social services sector.

**Keywords:** GRDP, GRDP Per Capita, Sectoral Growth, Regional Expansion

## Pendahulaun

Pembangunan daerah memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas pemerintah lokal. Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan publik, dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik wilayah. Desentralisasi fiskal dan administratif memungkinkan daerah merancang strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal (Kuncoro, 2014). Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya mendukung sistem nasional tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional (ADB, 2020).

Dalam kerangka desentralisasi tersebut, pemekaran wilayah muncul sebagai salah satu kebijakan untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah memanfaatkan pemekaran guna memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Penambahan pusat administrasi melalui pemekaran mampu memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga layanan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat (Effendy, 2008). Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan. Samuelson & Nordhaus (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan output barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Perkembangan ini dipengaruhi oleh produktivitas dan struktur ekonomi suatu wilayah. Wijaya (2017) menegaskan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi, khususnya pergeseran peran sektor primer, sekunder, dan tersier, sering menjadi tanda bahwa suatu wilayah mulai mengalami transformasi ekonomi.

Pemekaran wilayah juga dikaitkan dengan percepatan aktivitas ekonomi. Pemerintah berharap keberadaan daerah baru dapat membuka akses infrastruktur dan meningkatkan pemerataan pelayanan publik. Perkembangan wilayah dapat dilihat dari peningkatan area terbangun yang menandakan meningkatnya aktivitas ekonomi (Harmantyo, 2011; Saputra, 2024). Namun tidak semua daerah mampu merespons pemekaran secara optimal. Daerah dengan kapasitas fiskal dan administratif yang terbatas sering menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan publik secara memadai (Latifah, 2019; Smoke, 2015).

Kondisi tersebut terlihat pada Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 dan memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena seluruh wilayahnya terkurung daratan dan didominasi area pegunungan. Kondisi geografis ini mempengaruhi biaya pembangunan, distribusi logistik, dan akses pelayanan dasar. Delapan kabupaten yang tergabung ke dalam provinsi ini umumnya memiliki kapasitas fiskal dan kualitas pembangunan manusia yang masih rendah sehingga menempatkan Papua Pegunungan sebagai wilayah penting untuk dikaji terkait dampak pemekaran (Bank, 2021).

Penelitian mengenai pemekaran daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Santika et al. (2018) mencatat bahwa pemekaran Kabupaten Lombok Utara mendorong peningkatan kinerja ekonomi dan pemerataan pelayanan publik. Temuan serupa

diungkapkan Trikurniasih et al. (2019) yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan setelah pemekaran. Namun Firman (2009) menyoroiti sisi lain kebijakan ini, yaitu risiko fragmentasi anggaran dan tingginya biaya administrasi. Hababil et al. (2024) menambahkan bahwa pemerataan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta mengurangi ketimpangan pendapatan.

Meskipun studi mengenai pemekaran telah banyak dilakukan, penelitian tentang Papua Pegunungan masih terbatas. Wilayah ini memiliki tantangan geografis yang tidak ditemukan di daerah pemekaran lain sehingga dinamika ekonominya berpotensi berbeda. Hingga kini belum tersedia kajian empiris yang menilai dampak pemekaran terhadap indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, dan perkembangan sektor-sektor usaha. Selain itu, belum ada perbandingan sistematis antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran di provinsi baru ini (Hidayat, 2022; Sujatmiko, 2023).

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut. Kebaruan penelitian terletak pada fokus wilayah yang baru dimekarkan, penggunaan periode analisis sebelum dan sesudah pemekaran (2020–2021 dan 2022–2023), serta variabel ekonomi yang meliputi PDRB, PDRB per kapita, dan sektor lapangan usaha pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan uji beda untuk melihat perubahan struktural yang terjadi pasca pemekaran. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran Provinsi Papua Pegunungan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan perubahan PDRB, PDRB per kapita, dan perkembangan sektor-sektor produktif sebelum dan sesudah pemekaran. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan kebijakan pemekaran daerah serta memperkaya referensi akademik mengenai dinamika pembangunan pada wilayah otonom baru.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian secara terstruktur dan akurat serta menelaah hubungan antarvariabel tanpa perlakuan eksperimental. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode deskriptif bertujuan menelusuri keberadaan satu atau lebih variabel secara mandiri sehingga cocok untuk penelitian yang ingin menampilkan kondisi empiris apa adanya. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif dipakai untuk menunjukkan pengaruh antarvariabel melalui data numerik, analisis statistik, dan penafsiran hasil yang disesuaikan dengan teori yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Sumber utama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi resmi yang diakses melalui situs [bps.go.id](https://bps.go.id). Proses pengumpulan dilakukan dengan menelaah dokumen statistik, laporan tahunan, serta publikasi yang memuat indikator ekonomi penelitian. Pemanfaatan data sekunder memberikan efisiensi dari segi waktu karena peneliti tidak melakukan pengumpulan

langsung. Meskipun demikian, data tetap perlu diverifikasi untuk memastikan relevansi dan akurasi sehingga analisis tetap dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini dipilih karena mampu menyediakan data lengkap untuk menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda menggunakan Paired Sample T-Test. Statistik deskriptif digunakan untuk memaparkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, standar deviasi, dan ukuran penyebaran lainnya sebagaimana dijelaskan Ghazali (2016). Selanjutnya, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dilakukan untuk memastikan distribusi data berada dalam kategori normal dengan tolok ukur nilai signifikansi di atas 0,05. Setelah asumsi normalitas terpenuhi, Paired Sample T-Test diterapkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Analisis ini mencakup variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan pertumbuhan sektor usaha seperti pertanian, konstruksi, pendidikan, serta kesehatan. Data PDRB ADHK dan indikator sektor usaha digunakan sebagai dasar analisis dan sebagian nilai dikonversi ke log natural demi memperoleh hasil yang lebih stabil dan mudah diinterpretasikan.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Papua Pegunungan secara astronomis terletak pada koordinat 3.45'–4.2' Lintang Selatan dan 138.3'–139.4' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom di sebelah utara; Papua Nugini di sebelah timur; Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat di sebelah selatan; serta Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika di sebelah barat. Secara administratif, Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan mencapai 1.467,06 ribu jiwa, terdiri atas 783,22 ribu penduduk laki-laki dan 683,83 ribu penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan penduduk sebesar 1,12 persen dibandingkan tahun 2020, dengan rasio jenis kelamin sebesar 114,54 — yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk wilayah ini mencapai 28,69 jiwa/km<sup>2</sup> dengan sebaran yang sangat beragam. Kabupaten Jayawijaya memiliki kepadatan tertinggi yaitu 100,92 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kepadatan terendah yaitu 6,06 jiwa/km<sup>2</sup>. Gambaran ini menunjukkan karakter wilayah yang luas, heterogen, dan memiliki tantangan geografis yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro–Wilk karena ukuran sampel kurang dari 50. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap variabel memenuhi asumsi distribusi normal sebelum digunakan dalam analisis lanjutan. Dasar penilaian adalah nilai Sig. > 0,05 yang menunjukkan data berdistribusi normal.

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas Shapiro–Wilk

Variabel	Statistic	df	Sig.
PKT Sebelum	0.878	14	0.054
PKT Setelah	0.950	14	0.568
PDRB Sebelum	0.884	14	0.066
PDRB Setelah	0.903	14	0.124
PKP Sebelum	0.967	14	0.827
PKP Setelah	0.906	14	0.138
KNS Sebelum	0.937	14	0.383
KNS Setelah	0.950	14	0.560
PND Sebelum	0.795	14	0.004
PND Setelah	0.730	14	0.001
KSS Sebelum	0.978	14	0.960
KSS Setelah	0.854	14	0.225

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar variabel menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik tanpa perlu dilakukan transformasi data tambahan. Sementara itu, variabel PND (Jasa Pendidikan) memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 baik sebelum maupun sesudah perlakuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi data pada variabel PND tidak normal dan menyimpang dari asumsi normalitas yang disyaratkan. Dengan demikian, variabel PND memerlukan perhatian khusus dalam analisis lanjutan, seperti penggunaan metode statistik nonparametrik atau penerapan teknik transformasi data agar hasil analisis tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Uji Beda Paired Sample t-test

Uji Paired Sample t-test dimanfaatkan untuk menilai perubahan signifikan antara dua kondisi yang diuji pada subjek yang sama. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja daerah dan tingkat pemerataan ekonomi pada masa sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Karena data berasal dari objek penelitian yang sama namun pada dua periode berbeda, uji ini menjadi pilihan analisis yang paling tepat. Hipotesis yang diuji mencakup  $H_0$  yang menyatakan tidak ada perubahan antara kedua periode, serta  $H_1$  yang menyatakan bahwa pemekaran menimbulkan perbedaan pada kinerja dan pemerataan ekonomi

**Tabel 2.** Paired Samples Statistics

Pair	Variabel	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PKT_Sebelum	1.9986	14	2.53631	0.67786
	PKT_Setelah	4.1114	14	2.29144	0.61241
Pair 2	PDRB_Sebelum	15.5700	14	0.86730	0.23180
	PDRB_Setelah	15.6293	14	0.84041	0.22461
Pair 3	PKP_Sebelum	0.3614	14	1.37372	0.36714
	PKP_Setelah	2.4543	14	1.42680	0.38133
Pair 4	KNS_Sebelum	2.8171	14	2.76103	0.73792
	KNS_Setelah	4.8343	14	2.34628	0.62707
Pair 5	PND_Sebelum	0.6171	14	1.85566	0.49595
	PND_Setelah	2.9650	14	1.68541	0.45044

Pair	Variabel	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 6	KSS_Sebelum	4.0614	14	3.49428	0.93389
	KSS_Setelah	1.9900	14	1.97098	0.52677

**Keterangan:**

PKT = PDRB Per Kapita

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PKP = Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

KNS = Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

PND = Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

KSS = Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, sebagian besar variabel menunjukkan peningkatan setelah pemekaran wilayah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi naik dari 1,99 menjadi 4,11 sehingga menggambarkan perbaikan kinerja ekonomi daerah. PDRB per kapita juga meningkat meskipun tidak terlalu besar, dari 15,57 menjadi 15,63, sesuai nilai log natural dari data rupiah aslinya. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 0,361 menjadi 2,45. Aktivitas sektor konstruksi turut meningkat dari 2,81 menjadi 4,83, yang mencerminkan intensitas pembangunan fisik pasca pemekaran. Sektor jasa pendidikan juga menunjukkan perkembangan dengan kenaikan dari 0,617 menjadi 2,96. Namun sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial justru mengalami penurunan dari 4,06 menjadi 1,99, menandakan bahwa sektor ini belum berkembang seiring dengan sektor-sektor lainnya

**Paired Samples Correlations**

Tabel berikut menunjukkan korelasi antara nilai sebelum pemekaran dan setelah pemekaran pada masing-masing variabel:

**Tabel 3. Paired Samples Correlations**

Pair	Variabel	N	Correlation	Sig.
1	PKT_Sebelum & PKT_Setelah	14	0.839	0.000
2	PDRB_Sebelum & PDRB_Setelah	14	0.999	0.000
3	PKP_Sebelum & PKP_Setelah	14	0.354	0.214
4	KNS_Sebelum & KNS_Setelah	14	0.313	0.275
5	PND_Sebelum & PND_Setelah	14	0.022	0.940
6	KSS_Sebelum & KSS_Setelah	14	-0.344	0.228

Tabel di atas menunjukkan tingkat hubungan antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Korelasi dinyatakan kuat dan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, hanya dua variabel yang menunjukkan hubungan signifikan, yaitu pertumbuhan ekonomi (PKT) dan PDRB per kapita, dengan korelasi masing-masing 0,839 dan 0,999. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada kedua variabel tersebut cenderung memiliki pola hubungan yang konsisten sebelum dan setelah pemekaran. Sementara itu, keempat variabel lainnya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yang berarti hubungan antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran tidak signifikan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada variabel-variabel tersebut tidak menunjukkan keterkaitan yang kuat secara statistik.

## Paired Samples Test

Uji Paired Sample t-test dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah pemekaran.

Tabel 4. Paired Samples Test

Pair	Mean Difference	Std. Dev.	Std. Error Mean	95% CI (Lower)	95% CI (Upper)	t	df	Sig. (2-tailed)
PKT_Sebelum	-2.11286	1.38953	0.37137	-2.91515	-1.31057	-	13	0.000
PKT_Setelah						5.689		
PDRB_Sebelum	-0.05929	0.04731	0.01264	-0.08660	-0.03197	-	13	0.000
PDRB_Setelah						4.689		
PKP_Sebelum	-2.09286	1.59229	0.42556	-3.01222	-1.17350	-	13	0.000
PKP_Setelah						4.918		
KNS_Sebelum	-2.01714	3.01129	0.80480	-3.75581	-0.27848	-	13	0.026
KNS_Setelah						2.506		
PND_Sebelum	-2.34786	2.47918	0.66259	-3.77929	-0.91642	-	13	0.004
PND_Setelah						3.543		
KSS_Sebelum	2.07143	4.56460	1.21994	-0.56409	4.70695	1.698	13	0.113
KSS_Setelah								

### Keterangan:

PKT = PDRB Per Kapita

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PKP = Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

KNS = Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

PND = Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

KSS = Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Berdasarkan hasil olah data pada tabel, beberapa variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Perbedaan tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, serta sektor pertanian, konstruksi, dan jasa pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memberi pengaruh nyata terhadap lima indikator utama kinerja ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sebaliknya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki nilai signifikansi 0,113 sehingga tidak menunjukkan perubahan signifikan setelah pemekaran. Temuan ini menguatkan bahwa hipotesis H1 hingga H5 diterima, sedangkan H6 ditolak.

## Pembahasan

### PDRB Per Kapita dan Produk Domestik Regional Bruto

Hasil uji Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa PDRB dan PDRB per kapita memiliki nilai signifikansi 0,000 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemekaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan struktur administratif dan demografis setelah pemekaran berdampak langsung pada indikator ekonomi utama. Pemekaran mendorong redistribusi sumber daya, perubahan jumlah penduduk, serta efisiensi tata kelola sehingga perhitungan PDRB per kapita menjadi lebih mencerminkan kondisi ekonomi wilayah baru. Daerah dengan penduduk lebih sedikit tetapi memiliki potensi ekonomi cukup besar dapat menunjukkan peningkatan nilai PDRB per kapita,

sedangkan wilayah induk dapat mengalami penyesuaian akibat berkurangnya aset ekonomi.

Perkembangan PDRB dan PDRB per kapita tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Walaupun pertumbuhan PDRB sempat melambat pada 2023, pergerakan angkanya tetap positif sehingga menunjukkan peningkatan kapasitas produksi daerah dalam jangka panjang. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor konstruksi. PDRB per kapita Jayawijaya juga terus meningkat meskipun sempat terpengaruh pandemi pada 2020. Nilai PDRB per kapita tahun 2023 mencapai Rp 18.665.531, naik dari Rp 17.094.396 pada 2020. Hasil ini menegaskan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Santika et al. (2018) dan Trikurniasih et al. (2019) yang menemukan bahwa pemekaran dapat meningkatkan kinerja ekonomi melalui perbaikan akses layanan dan efisiensi tata kelola. Firman (2009) juga mencatat bahwa pemekaran dapat memunculkan peningkatan aset ekonomi di wilayah tertentu apabila didukung kapasitas fiskal dan administrasi yang memadai. Selain itu, Fadli dan Wibowo (2017) menunjukkan bahwa redistribusi aset pascapemekaran dapat memperbaiki indikator ekonomi wilayah baru.

### **Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Pengujian Paired Sample T-Test menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang berarti variabel sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pemekaran. Pemekaran membuat kontribusi sektor primer terlihat lebih jelas karena cakupan wilayah menjadi lebih kecil sehingga karakteristik ekonomi tiap daerah lebih teridentifikasi. Pemerintah daerah baru dapat lebih fokus pada pengembangan sektor utama ini melalui kebijakan yang lebih terarah, termasuk penyuluhan pertanian, pengelolaan hutan lestari, dan penguatan aktivitas perikanan.

Nilai tertinggi sektor ini terdapat pada Kabupaten Mamberamo Tengah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tumpuan utama ekonomi daerah karena karakteristik geografis yang bergunung-gunung dan relatif terisolasi, sehingga masyarakat banyak bergantung pada pertanian subsisten. Pertumbuhan sektor ini sempat melambat pada 2020 akibat pandemi tetapi kembali meningkat menjadi 3,65% pada 2023. Peningkatan ini selaras dengan dampak pemekaran yang memperbaiki akses kebijakan dan meningkatkan perhatian pemerintah terhadap potensi lokal. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima.

Hasil ini sejalan dengan teori Harmantyo (2011) yang menyatakan bahwa pemekaran memudahkan penajaman potensi sektoral di wilayah baru. Rahman (2020) juga menemukan bahwa pemekaran dapat memperkuat sektor primer apabila kebijakan lokal diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Selain itu, Hababil et al. (2024) menunjukkan bahwa sektor-sektor berbasis aktivitas lokal lebih cepat pulih pascaguncangan struktural dibanding sektor lain.

### **Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi**

Nilai signifikansi 0,026 menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada sektor konstruksi sebelum dan sesudah pemekaran. Pemekaran memicu peningkatan aktivitas pembangunan akibat kebutuhan mendesak untuk menyediakan fasilitas pemerintahan, perumahan pegawai, dan infrastruktur dasar. Kabupaten Yalimo menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada sektor ini, terutama melalui pembangunan fasilitas pemerintahan di Distrik Elelim serta peningkatan akses jalan seperti Jalan Trans Papua. Pola peningkatan ini juga berkaitan dengan pemulihan aktivitas pembangunan setelah masa pandemi.

Temuan ini mendukung penjelasan Aprianto & Mulyani (2021) bahwa daerah otonom baru biasanya mengalami lonjakan pembangunan fisik pada periode awal pemekaran. Adhikari (2018) juga mencatat bahwa pembangunan infrastruktur meningkat signifikan pada lima tahun pertama setelah pembentukan daerah baru. Penelitian Nasution (2019) menegaskan bahwa investasi infrastruktur di daerah terisolasi memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi lokal.

### **Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan**

Hasil uji Paired Sample T-Test menunjukkan nilai signifikansi 0,026, sehingga terdapat perbedaan signifikan pada sektor konstruksi sebelum dan setelah pemekaran. Sebelum pemekaran, wilayah Papua Pegunungan bergabung dalam Provinsi Papua sehingga pembangunan infrastruktur banyak terpusat di Jayapura. Wilayah pegunungan kurang mendapat perhatian sehingga pertumbuhan sektor konstruksi relatif rendah. Pemekaran menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas daerah baru, terutama untuk kebutuhan pusat pemerintahan, fasilitas publik, dan aksesibilitas antarwilayah.

Kabupaten Yalimo menjadi daerah dengan pertumbuhan konstruksi tertinggi. Setelah pemekaran, geliat pembangunan meningkat, terutama di Distrik Elelim sebagai pusat pemerintahan. Pembangunan kantor, perumahan pegawai, fasilitas dasar, serta akses jalan termasuk Jalan Trans Papua mendorong peningkatan aktivitas konstruksi. Fluktuasi pertumbuhan di tahun sebelumnya berbalik meningkat pada 2022–2023 seiring pemulihan pascapandemi. Kondisi ini memperlihatkan dampak positif pemekaran terhadap pembangunan fisik wilayah. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima.

Pola peningkatan ini konsisten dengan temuan Sari & Wibisono (2020) yang menyatakan bahwa pemekaran memungkinkan penyediaan layanan pendidikan lebih merata pada daerah terpencil. Nugroho (2017) menjelaskan bahwa otonomi daerah memperkuat kemampuan pemerintah lokal untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang inovatif. Yuliana (2022) juga mencatat bahwa sektor pendidikan cenderung lebih cepat pulih setelah adanya dukungan anggaran tambahan.

### **Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Uji Paired Sample T-Test memperlihatkan nilai signifikansi 0,004, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah

pemekaran pada sektor jasa pendidikan. Pemekaran memberikan peluang bagi pemerintah daerah baru untuk memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, peningkatan layanan, serta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemekaran juga membuka lapangan kerja bagi tenaga pendidik serta mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan.

Kabupaten Tolikara menunjukkan pertumbuhan sektor pendidikan yang paling tinggi. Meskipun mengalami penurunan pada 2020–2021 akibat pandemi, pertumbuhan sektor ini kembali meningkat setelah pemekaran, mencapai 8,19% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut didorong oleh pembangunan unit sekolah baru dan program pendidikan inklusif. Meski demikian, tantangan tetap ada terutama terkait kualitas tenaga pendidik dan pemerataan fasilitas. Hasil analisis ini memperkuat bahwa hipotesis 5 diterima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suwandi (2020) yang menunjukkan bahwa pemekaran sering tidak berdampak cepat pada sektor kesehatan karena tingginya kebutuhan investasi dan rendahnya ketersediaan tenaga medis. Prasetyo & Lestari (2021) juga menemukan bahwa daerah baru cenderung mengalami stagnasi layanan kesehatan ketika kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur tidak sejalan dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Periode observasi relatif singkat, sampel terbatas pada sejumlah kabupaten, dan data yang digunakan bersifat sekunder. Kondisi ini membatasi kemampuan analisis untuk menangkap efek jangka panjang dan variasi antarwilayah secara menyeluruh. Metode uji beda yang digunakan hanya mengidentifikasi perbedaan sebelum dan sesudah tanpa mengungkap faktor penyebab. Untuk memperkuat temuan, penelitian lanjutan sebaiknya memakai data panel atau pendekatan *difference-in-differences*, menambahkan analisis spasial, dan melengkapi dengan data primer seperti survei atau FGD. Langkah ini membantu menguji hubungan kausal dan menelusuri faktor-faktor penggerak perubahan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pemekaran wilayah di Provinsi Papua Pegunungan terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB dan PDRB per kapita menunjukkan perubahan nyata, ditandai dengan nilai signifikansi 0,000 yang menegaskan adanya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Perubahan juga terlihat pada sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan jasa pendidikan, yang seluruhnya memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran mendorong dinamika ekonomi pada sebagian besar sektor produktif daerah. Namun sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tidak menunjukkan perbedaan signifikan, mengindikasikan bahwa pemekaran belum memberikan dampak yang berarti terhadap layanan kesehatan dan sosial masyarakat.

Temuan tersebut memberikan beberapa implikasi bagi penelitian mendatang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

menggunakan cakupan sampel yang lebih luas dan rentang waktu yang lebih panjang agar dapat menangkap dampak pemekaran secara menyeluruh, serta menambahkan variabel kinerja keuangan untuk memperkaya analisis. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan kapasitas aparatur sebagai dasar percepatan pembangunan wilayah baru. Di sisi lain, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran sosial, terlibat dalam kegiatan gotong royong, serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan penggunaan data sekunder, sehingga kajian lanjutan disarankan untuk melibatkan data primer melalui diskusi kelompok terarah agar hasil analisis lebih mendalam dan kontekstual.

## Referensi

- ADB. (2020). *Decentralization and Public Service Delivery in Asia*. Asian Development Bank.
- Adhikari, K. (2018). Infrastructure Development and Administrative Expansion: Impacts of New Local Governments in Developing Regions. *Journal of Regional Policy*, 12(3), 145–160.
- Aprianto, D., & Mulyani, S. (2021). Dampak Pemekaran Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Lokal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 55–70.
- Bank, W. (2021). *Regional Development and Inequality in Indonesia*. World Bank Publications.
- Effendy, M. (2008). *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah*. RajaGrafindo Persada.
- Firman, T. (2009). Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development. *Urban Studies*, 46(3), 507–527.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hababil, A., Raharjo, R., & Pratama, A. (2024). Analisis Pemerataan Ekonomi dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial-Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–60.
- Harmantyo, D. (2011). *Dinamika Perkembangan Wilayah dan Transformasi Keruangan*. Universitas Indonesia Press.
- Hidayat, M. (2022). Evaluasi Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–60.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Regional*. UPP STIM YKPN.
- Latifah, N. (2019). Peran Infrastruktur dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Terpencil. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 5(3), 112–127.

- Nasution, R. (2019). Aksesibilitas Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Ekonomi Wilayah Terpencil. *Jurnal Transportasi Dan Wilayah*, 11(1), 33–47.
- Nugroho, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Era Desentralisasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(2), 112–124.
- Prasetyo, D., & Lestari, N. (2021). Kapasitas Layanan Kesehatan pada Daerah Otonom Baru. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 8(3), 221–234.
- Rahman, A. (2020). Perkembangan Sektor Pertanian pada Daerah Pemekaran. *Jurnal Agribisnis Regional*, 5(2), 77–89.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Saputra, R. (2024). Tantangan Administratif dalam Pemerintahan Daerah Baru di Indonesia. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 21–38.
- Sari, R., & Wibisono, D. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(1), 55–70.
- Smoke, P. (2015). Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform. *Public Administration and Development*, 35(4), 291–303.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujatmiko, A. (2023). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Baru di Indonesia Pasca Pemekaran. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 10(2), 89–104.
- Suwandi, H. (2020). Evaluasi Dampak Pemekaran terhadap Layanan Kesehatan Dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 88–102.
- Trikurniasih, Y., Suroso, A., & Putri, H. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 67–79.
- Wijaya, M. (2017). *Transformasi Struktur Ekonomi dan Dinamika Pembangunan Daerah*. Alfabeta.
- Yuliana, S. (2022). Pemulihan Sektor Pendidikan Pasca Krisis dan Pengaruh Desentralisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan*, 14(3), 203–215.